

DAFTAR PUSTAKA

A. Primer

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.31 tahun 2014 perubahan Atas Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.20 tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama

B. BUKU

- Aditya Wisnu Mulyadi, (2015). Jurnal Tesis *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*, Denpasar : Universitas Udayana.
- Abdul Aziz Hakim,(2011). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Abdul Haris Semendawai,(2016), *Penanganan Saksi dan Korban*, Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Agus Surono,(2013). *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta : Al-Azhar Press.
- Agustinus Pohan dan Topo Santoso *Et. All*, (2015). *Panduan Investigasi dan Penuntutan Hukum Terpadu*, Bogor : CIFOR.
- Agustinus Pohan, Topo Santoso, dan Martin Moerings,(2012). *Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Antonio Maria Costa,(2008). *Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime*. Newyork : United Nations Office on Drugs and Crime
- Bambang Semedi, (2010). *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Chaerudin, dkk,(2010).. *Tindak Pidana Korupsi*. PT. Refika Aditama. Bandung
- CST Kansil.(1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dendy Sugono, (2016) *.Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Dinal Fedrian, dan Elza Faiz, (2012). *Dialekta Pembaharuan Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta : Komisi Yudisial RI.
- Firman Wijaya,(2012). *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku
- Hadjon, Philipus, M., (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu,Surabaya,
- Heru Susetyo,(2012). *Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Jemima Njeri Kariri and Uyo Salifu, (2016) *Witness Protection Facilitating justice for complex crimes*, Nairobi, Kenya : ISS
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jimly Asshidiqie, (2013). *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi
- Jimly Asshidiqie, (2016). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jimly Asshidiqie,(2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI
- Juni Sjafrin Jahja, (2016). *Say No To Korupsi*, Jakarta : Visimedia
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, (2012). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2012*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, (2013). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2013*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, (2014). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2014*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, (2015). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2015*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, (2016). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2016*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, (2017). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2017*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, (2016). *Memahami Whistle Blower dan Justice Collaborator*, Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Lexy J. Moleong, (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lies Sulistiani, *et.. Al.(2012)/, Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,(2010). Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengnan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta
- Mansyur Sema.(2008). *Negara dan Korupsi* , Jakarta : penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Muladi,(2014). *Dinamika Viktimologi*, Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Oksidelfa Yanto, (2015). *Mafia Hukum*, Bogor : Swadaya Group
- Pengadilan Tinggi Medan, (2012). *Hubungan Antara Fakta, Moral Norma dan Doktrin*, Medan: Pengadilan Tinggi Medan.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011) . *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 4. Jakarta: Kencana.

- Philipus M.Hadjon,(1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*,Surabaya: Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon.(2010). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Rahadi Ramelan,(2008). *Cipinang desa tertinggal*, Jakarta : Republika Press
- Sanyoto, (2008). *Jurnal Penegakan Hukum di Indonesia*, Purwokerto : UNSOED Press.
- Sigit Artantojati,(2010), ” *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta,
- Sulistyowati Iriant, dan Widodo Dwi Putro,(2017). *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum*, Jakarta : Komisi Yudisial RI.
- Satjipto Rahardjo.(2010). *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.
- Supriyadi Widodo Eddyono ,(2014). *Prospek Penggunaan “Pelaku yang Bekerjasama” di Indonesia* Jurnal LPSK Edisi ke 1
- Soerjono Soekanto, (2012). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 8, Jakarta : Grafindo
- Soekanto, Soerjono, (1985). *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Syed Husein Alatas,(1980). *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*,IP3ES, Jakarta, 1980
- O. Notohamidjojo,(1970). *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen

C. KAMUS

- Chulsum, Umi dan Windy Novia, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko
- Depatemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Republik Indonesia,(2011). *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta : Kementerian Pendidikan

Poerwadaraminta,(1976), *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka,Jakarta

D. SITUS INTERNET

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/28/kpk-pertahankan-status-justice-collaborator-nazaruddin?page=2>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/28/kpk-pertahankan-status-justice-collaborator-nazaruddin?page=2> diakses pada tanggal 20 desember 2018 pukul. 18.30

Febri Diansyah, Kematian Whistleblower, dari <http://news.okezone.com/read/2011/03/31/58/440804/kematian-whistleblower> diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

Abdul Haris, Penanganan dan Perlindungan ‘Justice Collaborator’ dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, diakses darhttp://www.elsam.or.d/downloads/1308812895_penanganan_perlindungan_justcecollaborator.pdf diakses pada Kams, 19Juni 2019 dan

